

**Bidang Ilmu : Ekonomi / Sosial**

**LAPORAN PENELITIAN FUNDAMENTAL  
PEMBIAYAAN TAHUN I TAHUN 2007**



**JUDUL**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (PSAK) No. 24 TAHUN 2004**

**Ketua Peneliti:**

**Setia Budi Kurniawan, SE, MM**

**Anggota:**

**Dra. Eni Lisetyati, Ak, Msi.**

**Dibiayai oleh :**

**DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**Sesuai dengan**

**Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Fundamental  
Nomor SP2H:230/SP2H/PP/DP2M/II/2008**

**UNIVERSITAS MERDEKA MALANG  
NOPEMBER  
2008**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

# Sertifikat

Nomor: 1088/D3/PL/2009

Liberikan kepada:

**Setia Budi K.**

**UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

yang telah berpartisipasi aktif pada:

**Seminar Hasil Penelitian Fundamental Tahun 2009**  
yang diselenggarakan oleh DP2M-Ditjen Dikti, Depdiknas

Tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2009 di Jakarta

Sebagai

**Penyaji**



Jakarta, 31 Juli 2009

Direktur Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat

*Suryo Hapsoro Tri Utomo*  
Prof. Dr. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D

NIP. 131 471 476

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1. Judul : Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Imbalan Kerja PSAK No. 24 Revisi 2004
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Setia Budi Kurniawan, SE, MM
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP : 678 / FE
  - d. Bidang Keahlian : Akuntansi Manajemen
  - e. Jabatan Struktural : -
  - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala / IIIId
  - g. Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
  - h. Perguruan Tinggi : Universitas Merdeka Malang

3. Anggota Peneliti :

No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Fakultas / Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	Dra. Eni Lisetyati, Ak, Msi.	Akuntansi Keuangan	Ekonomi/Akuntansi	Unmer Malang

4. Pendanaan :

- a. Jangka waktu Penelitian yang diusulkan : 2 tahun
- b. Biaya Total yang diusulkan tahun 2007 Rp. 40.000.000,-
- c. Biaya yang terealisasi tahun 2007 Rp. 28.273.809,1789

Malang, 20 Nopember 2008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Peneliti



Setia Budi Kurniawan, SE, MM  
NIP. 678 / FE



Menyetujui,  
Ketua DP2M Universitas Merdeka Malang

Dr. Harmono, Msi  
NIP. 571 / FE

## RINGKASAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 revisi tahun 2004 tentang imbalan kerja mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dari *Internasional Accounting Standard* No. 19 Tahun 1998: *Employet Benefit*. PSAK No. 24 revisi 2004 merupakan upaya Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk mengharmonisasikan Standar Keuangan Akuntansi perusahaan di Indonesia dengan standar akuntansi internasional. Standar akuntansi ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan dunia usaha, pemerintah, praktisi keuangan, Aktuaris, Akuntan maupun investor dalam menyusun, mengevaluasi dan menganalisis laporan keuangan yang dibuat perusahaan. PSAK No. 24 revisi tahun 2004 dikeluarkan setelah pemerintah memberlakukan Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 tahun 2003. PSAK No. 24 revisi tahun 2004 ini wajib diterapkan perusahaan untuk seluruh imbalan kerja baik yang diatur perusahaan dalam PKB maupun akibat penerapan Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 tahun 2003.

Substansi pernyataan yang terkandung dalam PSAK No. 24 revisi 2004 secara implisit mengarah kepada pengakuan terhadap hak-hak sipil pekerja yang menganggap pekerja bukan lagi sebagai objek namun sudah merupakan subyek yang berarti kekayaan perusahaan, sedangkan secara eksplisit menjelaskan bentuk dan cara pengakuan, pengukuran dan pengungkapan imbalan kerja dalam laporan keuangan perusahaan. Pengakuan dalam PSAK No. 24 revisi 2004 menjelaskan pengakuan pencatatan yang berbasis akrual dan prinsip pengaitan (*matching concept*), sedangkan pengukurannya banyak menggunakan metode penilaian aktuaris. Pengungkapan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari pengakuan dan pengukuran keuangan perusahaan dan wajib disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas akuntabilitas perusahaan dan transparansi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung ke anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan metode dokumenter yang ada, seperti data risalah draft PSAK No. 24 revisi 2004, *IAS* No. 19: *employe benefit* dll. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, penelitian dengan judul Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 revisi tahun 2004 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah dijadualkan .

Hasil analisis terhadap PSAK No. 24 revisi tahun 2004 menunjukkan ada tiga aspek antara lain pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Aspek pengakuan mengarah pada substansi pencatatan imbalan kerja berbasis akrual dengan pengakuan adanya kewajiban imbalan kerja dan adanya pengaitan/penandingan beban pada saat terjadinya kewajiban imbalan kerja. Aspek pengukuran menjelaskan adanya pemanfaatan metode penilaian aktuarial dalam proses penilaian imbalan kerja dan aspek pengungkapan mengarah kepada akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang harus dilakukan perusahaan.

Penulis menyadari bahwa uraian-uraian yang tercakup dalam penelitian ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun agar penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu di masa depan.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak mendukung terselesainya penelitian fundamental ini, antara lain DP2M Dikti Depdiknas yang telah mendanai kegiatan penelitian fundamental, Lembaga Penelitian Unmer Malang, Mahasiswa PKN D3 Akuntansi Unmer Malang, Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Prof. Dr. Grahita Chandrarin, Ak, MSi dan semua pihak yang tidak tersebut dalam tulisan ini.

Malang, 20 Nopember 2008

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN.....	i
RINGKASAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	
1.2 Masalah Penelitian .....	
1.3 Tujuan .....	
1.4 Manfaat Penelitian.....	
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	
2.1 PSAK No. 24 (1994): Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun .....	
2.2 Undang Undang No. 13 tahun 2003: Ketenagakerjaan.....	
2.3 PSAK No. 24 (revisi 2004): Imbalan Kerja .....	
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	
3.1 Metode Pengumpulan Data .....	
3.2 Populasi dan Sampel.....	
3.3 Jangka Waktu Penelitian .....	
3.4 Teknik Analisa Data .....	



4.5 Faktor-faktor yang melatar-belakangi dikeluarkannya Panduan Implementasi PSAK No. 1 : PSAK No. 24 revisi 2004

.....

BAB V SIMPULAN DAN KETERBATASAN .....

5.1 Simpulan.....

5.2 Keterbatasan .....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rerangka Teoritikal .....

## DAFTAR TABEL

### Tabel

- Tabel 1. Perhitungan Nilai kewajiban kini dan Biaya Kini .....
- Tabel 2. Asumsi Penyusutan Aktuarial .....
- Tabel 3. Penghitungan Asumsi Penyusutan Aktuarial .....
- Tabel 4. Perhitungan Manfaat Imbalan Kerja dasar UUK-13 tahun 2004 ....
- Tabel 5. Penghitungan Total Nilai Kini Kewajiban .....
- Tabel 6. Penghitungan Biaya Jasa Kini dan Nilai Kini Kewajiban .....
- Tabel 7. Jurnal Pencatatan Beban Manfaat Pensiun per Tahun, Kas, Beban Dibayar Dimuka/Terutang, Proyeksi Kewajiban Aktuarial, Aktiva Dana Pensiun .....
- Tabel 8. Jurnal Pencatatan Beban Manfaat Pensiun per Tahun, Kas, Beban Dibayar Dimuka/Terutang, Proyeksi Kewajiban Aktuarial, Aktiva Dana Pensiun .....
- Tabel 9. Penghitungan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya .....
- Tabel 10. Data dan Informasi Program Imbalan Pasti .....
- Tabel 11. Keuntungan/kerugian aktuarial – kewajiban .....
- Tabel 12. Penerapan batasan koridor, keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui dan yang belum diakui .....
- Tabel 13. Pengakuan Kewajiban diakui dalam neraca, Beban diakui dalam laporan laba rugi, dan penjelasan perubahan kewajiban yang ada di neraca .....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Imbalan kerja sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 24. (Revisi 2004), didefinisi sebagai seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja. PSAK No. 24 ini wajib diterapkan perusahaan untuk seluruh imbalan kerja baik yang diatur perusahaan dalam PKB maupun akibat penerapan Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 tahun 2003. UUK No. 13 tahun 2003 telah mengatur imbalan kerja bagi karyawan apabila mencapai usia pensiun, meninggal dunia, cacat tetap total atau mengundurkan diri. Termasuk di dalamnya, yang diatur pada PSAK No.24 sebagai imbalan pasca kerja (*post employment benefit*) dan imbalan jangka panjang lainnya (*other long-term employee benefits*).

PSAK No. 24 mengharuskan perusahaan untuk mengakui: (1) kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan; serta (2) beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Pernyataan ini diadopsi dari IAS No. 19 tentang *Employee Benefit* dan merevisi PSAK No. 24 tahun 1994 tentang akuntansi biaya manfaat pensiun, yang mengatur tentang program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti.

Implementasi akuntansi imbalan kerja yang diatur dalam standar tersebut di atas ternyata mempunyai banyak permasalahan di praktik. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis standar akuntansi imbalan kerja, kemudian menjelaskan segala permasalahan yang ada di praktik untuk akhirnya dicarikan solusinya serta menganalisis hal-hal yang terkait dengan profesi lain, yaitu profesi aktuaris. Penelitian tentang akuntansi imbalan kerja atau akuntansi biaya manfaat pensiun penting untuk diteliti. Jenis penelitian seperti ini telah diteliti di beberapa negara maju, sedangkan di Indonesia masih jarang diteliti, oleh karena itu peneliti termotivasi untuk meneliti masalah akuntansi imbalan kerja di Indonesia. Misalnya di Amerika Serikat, setiap *Financial Accounting Standards Board (FASB)* mengeluarkan standar baru, maka sebelum dan sesudahnya (implementasi dan dampaknya) selalu diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi ketepatan/kesesuaian setiap standar baru yang dikeluarkan dengan praktik yang ada. Sebagaimana halnya dengan riset yang telah dilakukan oleh DeBerg *et al.* (1987), yang mengamati tentang akuntansi untuk pensiun karyawan/ tenaga kerja di Amerika Serikat, berkenaan dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan no 87 oleh FASB. Tujuan penelitiannya adalah mempresentasikan metode pembelajaran yang menginterpretasi persyaratan pelaporan *Financial Accounting Standard (FAS) No. 87* sebagai rekonsiliasi pertentangan perspektif mengenai kewajiban pensiun (*pension obligations*), yang harus disusun/dibentuk oleh perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan/mendemonstrasikan bagaimana FAS No. 87 merekonsiliasi perspektif yang berlawanan dalam

presentasi laporan keuangan dasar dan bagaimana perspektif tersebut bermanfaat dalam memahami persyaratan pelaporan bekeaan dengan utang minimum dan laba dan rugi aktuarial.

## 1.2 Masalah Penelitian

Penelitian ini mengamati implementasi standar imbalan kerja, setelah mengkaji dan menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan kerja. Studi ini dilakukan untuk kasus di negara Indonesia. Permasalahan tersebut muncul dari perusahaan-perusahaan yang sudah diharuskan untuk menerapkan seluruh imbalan kerja, baik yang diatur dalam PKB maupun UUK No. 13 tahun 2003. Beberapa pihak lain yang terkena dampak implementasi standar ini adalah akademisi, akuntan publik, serta profesi lain yaitu aktuaris.

Beberapa pokok permasalahan yang akan dideskripsi dan dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah **pengakuan** imbalan kerja menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 revisi 2004?
2. Bagaimanakah **pengukuran** imbalan kerja menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 revisi 2004?
3. Bagaimanakah **pengungkapan** imbalan kerja menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 revisi 2004?
4. Faktor apa saja yang melatar-belakangi dikeluarkannya Panduan Implementasi No.1 PSAK No. 24 revisi 2004?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengungkap dan menganalisis pengakuan menurut Pernyataan Standar Imbalan Kerja no. 24 (Revisi 2004).
2. Ingin mengungkap dan menganalisis pengukuran menurut Pernyataan Standar Imbalan Kerja no. 24 (Revisi 2004).
3. Ingin mengungkap dan menganalisis pengungkapan menurut Pernyataan Standar Imbalan Kerja no. 24 (Revisi 2004).
4. Ingin menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan dikeluarkannya Panduan Implementasi PSAK No. 24?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademisi, penelitian tentang imbalan kerja ini penting dan perlu dilakukan di Indonesia, karena penelitian seperti ini belum pernah dilakukan, padahal pengetahuan tentang imbalan kerja ini sangat diperlukan untuk proses pembelajaran dan pengembangan teori oleh peneliti berikutnya. Sejauh ini para akademisi hanya dapat mempelajari PSAK, UU, Pedoman Implementasi, yang semuanya itu hanya bersifat teoritis, tanpa tahu bagaimana proses, permasalahan atau fenomena-fenomena yang ada di praktik, serta alasan apa yang melatar-belakangi penyusunan semua aturan-aturan tersebut.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan pedoman yang mudah difahami (karena disajikan secara sederhana dan aplikatif) untuk menghitung imbalan kerja bagi karyawannya. Biasanya bahasa aturan-aturan/regulasi seperti standar dan undang-undang, sulit untuk

difahami oleh para manajer. Oleh karena itu, disengaja atau tidak disengaja, terkadang banyak praktisi salah interpretasi dalam membaca regulasi.

3. Bagi DSAK, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan atas implementasi standar yang telah disusun, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk langkah berikutnya yang perlu diambil dalam menyikapi dampak implementasi standar tersebut.
4. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/ masukan untuk mengevaluasi relevansi keberadaan UUK No 13 tahun 2003, yang merupakan kepanjangan dari kebijakan pemerintah. Jika ternyata dirasa tidak relevan lagi dengan perkembangan praktik dewasa ini, maka UU tersebut dapat diusulkan untuk direvisi.
5. Bagi Akuntan Publik, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang segala permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi kliennya, sehingga dapat berlaku bijak dalam menyikapi masalah perhitungan imbalan kerja.
6. Bagi Aktuaris, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam membantu perusahaan untuk menyusun/menghitung imbalan kerja karyawannya.
7. Bagi pihak lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan ekonomi.